



Katalog dan Kalender Konsultansi

2017/2018



Sekapur Sirih

Untuk mewujudkan Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel, dibutuhkan pegawai yang kompeten dan profesional. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara berinisiatif menyelenggarakan Bimbingan Konsultasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dalam melaksanakan tugas, khususnya di bidang pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan desa.

Katalog dan kalender Konsultasi ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai jenis pelatihan dan waktu penyelenggaraannya.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada semua instansi pemerintah daerah yang selama ini memberikan kepercayaan kepada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan pemerintah daerah dan desa secara akuntabel dan transparan.

Kendari, Mei 2017
Kepala Perwakilan BPKP
Provinsi Sulawesi Tenggara

R. Ersi Soenarsih



Daftar Isi

Sekapur Sirih.....	2
Kalender Konsultasi	4
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dengan SIMDA Keuangan.....	6
Penyusunan Laporan Aset Tetap Pemerintah Daerah dengan SIMDA Barang Milik Daerah	7
Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan SIMDA Pendapatan	8
Perencanaan Daerah dengan SIMDA Perencanaan	9
Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa dengan SISKEUDES	10
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Integratif.....	11
Audit Investigatif.....	12
Jasa Lainnya	13

Kalender Konsultasi
Semester II/2017 dan Tahun 2018

No	Nama Konsultasi	Jumlah		Waktu Penyelenggaraan*)	Lokasi
		Kelas	Hari		
1	Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dengan SIMDA Keuangan	1	5	12 s.d 16 Feb 2018 20 s.d 24 Agu 2018	BPKP Prov. Sultra
2	Penyusunan Laporan Aset Tetap Pemerintah Daerah dengan SIMDA Barang Milik Daerah	1	5	10 s.d 14 Jul 2017 26 Feb s.d 2 Mar 2018 9 s.d 13 Jul 2018	BPKP Prov. Sultra
3	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan SIMDA Pendapatan	1	5	7 s.d 11 Agu 2017 4 s.d 8 Jun 2018 6 s.d 10 Agu 2018	BPKP Prov. Sultra
4	Perencanaan Daerah dengan SIMDA Perencanaan	1	5	11 s.d 15 Sep 2017 12 s.d 16 Mar 2018 10 s.d 14 Sep 2018	BPKP Prov. Sultra

No	Nama Konsultasi	Jumlah		Waktu Penyelenggaraan*)	Lokasi
		Kelas	Hari		
5	Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa dengan SISKEUDES	1	5	2 s.d 6 Okt 2017 25 s.d 29 Jun 2018 1 s.d 5 Okt 2018	BPKP Prov. Sultra
6	Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Integratif	1	5	23 s.d 27 Okt 2017 26 s.d 30 Mar 2018 22 s.d 26 Okt 2018	BPKP Prov. Sultra
7	Audit Investigatif	1	5	16 s.d 20 Okt 2017 12 s.d 16 Feb 2018 15 s.d 19 Okt 2018	BPKP Prov. Sultra

Catatan:

1. Waktu penyelenggaraan bisa berubah, disesuaikan dengan ketersediaan tim BPKP;
2. Peserta Konsultasi/Pelatihan membawa surat tugas dan dokumen penugasan yang lengkap;
3. Peserta menggunakan pakaian rapi dan sopan;
4. Biaya perjalanan dinas peserta menggunakan anggaran masing-masing peserta;
5. Calon peserta mendaftarkan diri dengan mengirimkan surat permohonan Bimbingan Konsultasi paling lambat 2 minggu sebelum kelas dimulai; dan
6. Kegiatan Konsultasi/Pelatihan tidak dipungut biaya apapun.

Contact Person:

Listyono Korwas Bidang APD	0812 8686 8704	Faksimile	(0401) 3122126
Telepon	(0401) 3125023	Email	sultra@bpkp.go.id

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah dengan SIMDA Keuangan

Overview

Aplikasi SIMDA versi 2.7 dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara efisien dan efektif, serta dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual dengan wajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan

Bimbingan Konsultasi bertujuan agar peserta diklat dapat memahami pengelolaan keuangan dengan alat bantu aplikasi SIMDA.

Sasaran

Setelah mengikuti Bimbingan Konsultasi ini, diharapkan peserta dapat:

1. memahami cara pengoperasian SIMDA Keuangan versi 2.7;
2. memahami pengelolaan keuangan daerah menggunakan;
3. menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan versi 2.7 dalam penyusunan anggaran;

4. menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan versi 2.7 dalam penatausahaan keuangan daerah;
5. menggunakan aplikasi SIMDA Keuangan versi 2.7 dalam melakukan akuntansi keuangan daerah.

Materi

Materi yang dibahas dalam Bimbingan Konsultasi ini meliputi:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Gambaran Umum Aplikasi SIMDA Keuangan | Hari ke-1 |
| 2. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah | Hari ke-1 |
| 3. <i>System Administrator</i> | Hari ke-2 |
| 4. <i>System Requirement</i> | Hari ke-2 |
| 5. Teori dan Praktik Penyusunan Anggaran | Hari ke-3 |
| 6. Teori dan Praktik Penatausahaan Keuangan Daerah | Hari ke-4 |
| 7. Teori dan Praktik Akuntansi Keuangan Daerah | Hari ke-5 |

Waktu

Bimbingan Konsultasi dilaksanakan selama 5 (lima) hari yang terdiri atas teori dan simulasi menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan.

Peserta

Bimbingan Konsultasi ini ditujukan bagi Admin Aplikasi SIMDA dan pejabat/pengelola yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Aset Tetap Pemerintah Daerah dengan SIMDA Barang Milik Daerah

Overview

Barang Milik Daerah (BMD) merupakan salah satu unsur aset daerah yang memiliki nilai terbesar dan peran penting dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah.

Ruang lingkup pengelolaan BMD meliputi kegiatan perencanaan sampai dengan pelepasan dan pertanggungjawabannya. Kegagalan dalam mengelola dan menyajikan laporan aset tetap daerah berdampak tidak diperolehnya opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari BPK.

Tujuan

Bimbingan Konsultasi ini dirancang untuk membekali kemampuan bagi para peserta agar mampu mengelola BMD secara akuntabel, akurat, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran

Setelah mengikuti Bimbingan Konsultasi ini, peserta diharapkan dapat:

1. Memahami pengelolaan BMD secara umum meliputi tahap perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemindahtanganan;

2. Melaksanakan penatausahaan dan akuntansi BMD menggunakan Aplikasi SIMDA BMD.

Materi

Materi yang dibahas dalam Bimbingan Konsultasi ini meliputi:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Perencanaan BMD | Hari ke-1 |
| 2. Penggunaan BMD | Hari ke-1 |
| 3. Pemanfaatan BMD | Hari ke-1 |
| 4. Pemeliharaan BMD | Hari ke-1 |
| 5. Pengamanan BMD | Hari ke-2 |
| 6. Pemindahtanganan BMD | Hari ke-2 |
| 7. Penatausahaan dan Akuntansi BMD | Hari ke-3 |

Waktu

Bimbingan Konsultasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yang terdiri atas teori dan simulasi menggunakan Aplikasi SIMDA BMD.

Peserta

Bimbingan Konsultasi ini ditujukan bagi Admin Aplikasi SIMDA dan pejabat/pengelola BMD yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyusunan laporan BMD.

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah dengan SIMDA Pendapatan

Overview

Sistem otonomi daerah menuntut pemerintah daerah dapat mengelola pendapatan daerah yang dapat menunjang keuangan dan pembangunan daerahnya. Pengetahuan dalam menatausahakan pajak dan retribusi daerah diperlukan untuk menunjang optimalisasi pendapatan daerah dan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah kepada masyarakat.

Tujuan

Bimbingan Konsultasi ini dirancang untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan teknis dalam melakukan pendaftaran, pendataan, penatausahaan dan pelaporan pendapatan asli daerah menggunakan SIMDA Pendapatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sasaran

Setelah mengikuti Bimbingan Konsultasi ini, peserta diharapkan dapat:

1. memahami prinsip dasar, ketentuan dan jenis-jenis PAD;

2. menggunakan SIMDA Pendapatan untuk pendaftaran, pendataan, penatausahaan dan pelaporan PAD .

Materi

Materi yang dibahas dalam Bimbingan Konsultasi ini meliputi:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Gambaran Umum Pengelolaan PAD | Hari ke-1 |
| 2. <i>System Requirement</i> SIMDA Pendapatan | Hari ke-1 |
| 3. Teori dan Praktik Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak/Retribusi Daerah | Hari ke-1 |
| 4. Teori dan Praktik Penatausahaan PAD | Hari ke-2 |
| 5. Teori dan Praktik Pelaporan PAD | Hari ke-3 |

Waktu

Bimbingan Konsultasi dilaksanakan selama 3 (tiga) hari yang terdiri atas teori dan simulasi menggunakan Aplikasi SIMDA Pendapatan.

Peserta

Bimbingan Konsultasi ini ditujukan bagi Admin Aplikasi SIMDA dan pejabat/pengelola PAD yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyusunan laporan PAD.

Perencanaan Daerah dengan SIMDA Perencanaan

Overview

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia, dan menetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan memiliki tujuan:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Untuk itu proses perencanaan perlu sinergi dan integrasi antara kegiatan dengan anggaran, mulai dari proses Musrenbang, Penyusunan Renja SKPD, RKPD hingga KUA PPAS.

Tujuan

Bimbingan Konsultasi bertujuan agar peserta diklat dapat memahami alur perencanaan daerah dengan alat bantu aplikasi SIMDA Perencanaan.

Sasaran

Setelah mengikuti Bimbingan Konsultasi ini, diharapkan peserta dapat:

1. memahami cara pengoperasian SIMDA Perencanaan;
2. menggunakan aplikasi SIMDA Perencanaan dalam penyusunan RPJMD;
3. menggunakan aplikasi SIMDA Perencanaan dalam penyusunan Renstra;
4. menggunakan aplikasi SIMDA Perencanaan dalam penyusunan Renja OPD.

Materi

Materi yang dibahas dalam Bimbingan Konsultasi ini meliputi:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Gambaran Umum Perencanaan Pembangunan Daerah | Hari ke-1 |
| 2. <i>System Requirement</i> SIMDA Perencanaan | Hari ke-1 |
| 3. Teori dan Praktik Penyusunan RPJMD | Hari ke-2 |
| 4. Teori dan Praktik Penyusunan Renstra | Hari ke-3 |
| 5. Teori dan Praktik Penyusunan Renja OPD | Hari ke-4 & 5 |

Waktu

Bimbingan Konsultasi dilaksanakan selama 5 (lima) hari yang terdiri atas teori dan simulasi menggunakan Aplikasi SIMDA Perencanaan.

Peserta

Bimbingan Konsultasi ini ditujukan bagi Pejabat Perencanaan OPD yang bertanggung jawab atas menyusun dokumen perencanaan pembangunan pemerintah daerah.

Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa dengan SISKEUDES

Overview

Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014, desa diberi kesempatan besar untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya sehingga kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang ada.

Peran dan fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka membantu pemerintah desa diantaranya adalah melakukan pengawalan berupa pemberian bimbingan dan Konsultasi terkait pengelolaan keuangan desa.

Tujuan

Memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa dalam peningkatan kualitas akuntabilitas keuangan desa.

Sedangkan bagi peserta di instansi APIP, Bimbingan Konsultasi ini bertujuan untuk membekali APIP dalam melaksanakan peran pembinaan dan pengawasan tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah desa.

Sasaran

Setelah mengikuti Bimbingan Konsultasi ini, peserta diharapkan mampu:

1. memahami regulasi keuangan desa;
2. memahami perencanaan dan penganggaran keuangan desa;
3. memahami pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa;
4. mampu mengoperasikan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Materi

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Kebijakan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa oleh BPKP | Hari ke-1 |
| 2. Gambaran Umum Pengelolaan Keuangan Desa | Hari ke-1 |
| 3. <i>System Requirement</i> dan Gambaran Umum Aplikasi SISKEUDES | Hari ke-1 |
| 4. Simulasi Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan, dan Pelaporan menggunakan Aplikasi SISKEUDES | Hari ke-2 s.d 5 |

Waktu

Bimbingan Konsultasi dilaksanakan selama 5 (lima) hari yang terdiri atas teori dan latihan kasus.

Peserta

Bimbingan Konsultasi ini ditujukan bagi:

1. Admin Aplikasi SIMDA dan pejabat/pengelola yang bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan desa;
2. APIP yang bertugas memberikan pembinaan dan pengawasan tata kelola keuangan pemerintah desa.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Integratif

Overview

Dalam manajemen pemerintah modern, sistem pengendalian intern merupakan suatu hal yang mutlak harus dibangun dan dilaksanakan oleh setiap unit organisasi maupun kegiatan pemerintah. Hal ini diperlukan agar penyelenggaraan pemerintah dapat memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administratif, perdata, dan pidana.

Tujuan

Bimbingan Konsultasi ini dirancang untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada para peserta dalam menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah yang integratif di lingkungan kerjanya.

Sasaran

Setelah mengikuti Bimbingan Konsultasi ini, peserta diharapkan mampu:

1. Memahami pengertian dan siklus penyelenggaraan SPIP yang integratif;
2. Memahami konsep 5 subunsur SPIP;
3. Melaksanakan *Control Environment Evaluation (CEE)*;
4. Mengidentifikasi dan menganalisis resiko;
5. Mengevaluasi dan merumuskan *existing control*;
6. Merumuskan informasi dan komunikasi;
7. Menyempurnakan kebijakan dan SOP;

8. Memonitor penyelenggaraan SPIP.

Materi

Materi yang dibahas dalam Bimbingan Konsultasi ini meliputi:

- | | |
|---|---------------|
| 1. Overview Penyelenggaraan SPIP | Hari ke-1 |
| 2. Konsep 5 Subunsur SPIP | Hari ke-1 |
| 3. <i>Control Environment Evaluation</i> | Hari ke-1 |
| 4. Analisis Tujuan dan Penilaian Resiko | Hari ke-2 & 3 |
| 5. Evaluasi dan Perumusan <i>Existing Control</i> | Hari ke-4 |
| 6. Perumusan Informasi dan Komunikasi | Hari ke-4 |
| 7. Penyempurnaan Kebijakan dan SOP | Hari ke-5 |
| 8. Monitoring Penyelenggaraan SPIP | Hari ke-5 |

Waktu

Bimbingan Konsultasi dilaksanakan selama 5 (lima) hari yang terdiri atas teori dan latihan kasus.

Peserta

Bimbingan Konsultasi ini ditujukan bagi seluruh manajemen dan pegawai di lingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah memperoleh sosialisasi SPIP.

Audit Investigatif

Overview

Audit investigatif merupakan salah satu aktivitas dalam rangka implementasi strategi memerangi *fraud*/korupsi dengan pendekatan investigatif. Audit ini umumnya merupakan pengembangan lebih lanjut atas hasil audit operasional yang menunjukkan adanya indikasi KKN, namun dapat juga didasarkan pada berita di media massa ataupun laporan/pengaduan dari masyarakat.

Tujuan

Bimbingan Konsultasi ini dirancang untuk membekali peserta pelatihan dengan pemahaman yang komprehensif tentang tugas-tugas keinvestigasian, agar mampu melakukan audit investigatif pada sektor pengelolaan keuangan.

Sasaran

Setelah mengikuti Bimbingan Konsultasi ini, peserta diharapkan dapat:

1. Memahami peran, hak, serta kewajiban auditor investigatif;
2. Memahami konsepsi audit investigatif;
3. Menyusun dan melaksanakan langkah-langkah praperencanaan dan perencanaan audit investigatif;
4. Melaksanakan kegiatan pengumpulan dan evaluasi bukti;
5. Melaksanakan teknis wawancara dan membuat Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK);

6. Menyusun laporan hasil audit investigatif;

Materi

Materi yang dibahas dalam Bimbingan Konsultasi ini meliputi:

- | | |
|---|-----------|
| 1. Aspek Hukum dalam Audit Investigatif | Hari ke-1 |
| 2. Konsep Audit Investigatif | Hari ke-1 |
| 3. Perencanaan Audit Investigatif | Hari ke-2 |
| 4. Pengumpulan dan Evaluasi Bukti | Hari ke-3 |
| 5. Teknik Wawancara | Hari ke-4 |
| 6. Laporan Hasil Audit Investigatif | Hari ke-5 |

Waktu

Bimbingan Konsultasi dilaksanakan selama 5 (lima) hari yang terdiri atas teori dan latihan kasus.

Peserta

Bimbingan Konsultasi ini ditujukan bagi pegawai dilingkungan pengawasan, yaitu:

1. Auditor
2. Pejabat struktural yang bertanggung jawab atas pelaksanaan audit investigatif
3. SPI BUMN/D

Peserta dipersyaratkan sudah memiliki pengalaman atau pengetahuan audit tingkat lanjut.

Jasa Lainnya

Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Konsultasi tentang:

1. Asistensi dalam Implementasi Probitas Audit atas Pengadaan Barang Jasa yang strategis dan bernilai material, mulai dari perencanaan sampai dengan pemanfaatan;
2. Asistensi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP); dan
3. Asistensi Penyusunan *Action Plan* terhadap hasil audit.

Bidang Akuntan Negara

Konsultasi tentang:

1. Audit Kinerja PDAM;
2. Bimtek/Asistensi Penerapan SAK-ETAP PDAM;
3. Asistensi Penyusunan *Corporate Plan*;
4. Asistensi Sistem Informasi Akuntansi (SIA) PDAM;
5. Asistensi Manajemen Asset;
6. Asistensi KPI;
7. Asistensi Penyusunan Syarat Administrasi BLUD;
8. Evaluasi Kinerja BLUD RSUD;
9. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan BLUD;
10. Bimbingan Teknis/Asistensi Penerapan GCG BUMD;
11. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan BUMD;
12. Sosialisasi dan Asistensi Manajemen Resiko; dan
13. Audit Tujuan Tertentu.

Bidang Investigasi

Konsultasi tentang:

1. Sosialisasi Anti korupsi;
2. Bimbingan Teknis/Asistensi implementasi FCP;
3. Kajian pengawasan;
4. Audit investigasi atas Hambatan Kelancaran Pembangunan, Eskalasi dan Klaim;
5. Audit investigasi, Perhitungan Kerugian Keuangan Negara, dan Pemberian Keterangan Ahli atas permintaan Instansi Penyidik; dan
6. Audit investigasi atas permintaan Instansi lainnya.

Bidang Instansi Pemerintah Pusat

Konsultasi tentang:

1. Pengawasan lintas sektoral Bidang Perekonomian;
2. Pengawasan atas permintaan *stakeholder* Bidang Perekonomian;
3. Pengawasan atas proyek pinjaman hutang luar negeri (PHLN);
4. Pengawasan lintas sektoral Bidang Palsoskam;
5. Pengawasan Bendahara Umum Negara Bidang Palsoskam;
6. Pengawasan atas permintaan presiden Bidang Palsoskam;
7. Bimbingan Teknis/Asistensi penyusunan laporan keuangan instansi pemerintah;
8. Optimalisasi penerimaan negara;
9. Pengawasan atas permintaan *stakeholder* Bidang Palsoskam; dan
10. Pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

Bidang Program Pelaporan dan Pembinaan APIP

Konsultasi tentang pembinaan APIP termasuk pembinaan jabatan auditor/JFA di lingkungan APIP Daerah.